

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUBARAN IBADAH DI GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD (GKKD) BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN TJK)

Oleh

Nyoman Yogi Sukarya

Tindak pidana pembubaran ibadah adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menargetkan korban. Pada Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN TJK, terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman serta bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari studi kepustakaan. Proses pengolahan data dilakukan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, serta penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa bertanggung jawab secara pidana karena terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. Terdakwa memiliki kesadaran hukum, kondisi kejiwaan normal, tidak dibawah umur, tidak dalam perintah jabatan, tidak dalam kondisi menjalankan perintah Undang-undang serta memiliki hubungan batin dengan perbuatannya yang dilakukan secara sengaja. Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf, karena terdakwa mengakui perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Putusan tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi terdakwa serta keadilan bagi korban.

Nyoman Yogi Sukarya

Berdasarkan hal tersebut, saran dari penelitian ini yaitu diharapkan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum. dan hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan harus cermat dan berhati-hati dan juga dalam hal pembuktian untuk menentukan seseorang terdakwa memang benar bersalah dan Hakim dalam memberikan suatu putusan kepada terdakwa harus mengedepankan rasa keadilan bagi terdakwa maupun korban agar tujuan dari hukum dapat tercapai.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Pemaksaan dengan Kekerasan atau Ancaman

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST THE PERPETRATORS OF THE DISSOLUTION OF WORSHIP IN THE KEMAH DAUD CHRISTIAN CHURCH (GKKD) BANDAR LAMPUNG (Study of Decision Number: 314/Pid.B/2023/PN TJK)

By

Nyoman Yogi Sukarya

The crime of dissolution of worship is an unlawful act committed with violence or threat of violence to achieve certain goals by targeting victims. In Decision Number: 314/Pid.B/2023/PN TJK, the defendant Wawan Kurniawan Bin Rusdi (deceased) was legally and convincingly proven to have committed the crime of coercion with violence or threats and was sentenced to 3 (three) months imprisonment. The problem in this study is how the criminal liability of the perpetrator of coercion with violence or threats and how the legal considerations of the judge in imposing a sentence of 3 (three) months imprisonment against the perpetrator of the crime of coercion with violence or threats.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The data used is primary obtained through interviews, while secondary data from literature studies. Data processing is done by identifying data, classifying data, and drawing conclusions. The data is analyzed qualitatively by describing information systematically to answer the problems in this study.

Based on the results of research and discussion, it is concluded that the defendant is criminally responsible for violating Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code. The defendant has legal awareness, normal mental condition, is not underage, is not under official orders, is not in a condition of carrying out the orders of the Law and has a mental connection with his actions which were committed intentionally. There was no justification or excuse, because the defendant admitted his actions. The judge's consideration in imposing the sentence included juridical, sociological, and philosophical aspects. The verdict is expected to provide a deterrent effect for the defendant and justice for the victim.

Nyoman Yogi Sukarya

Based on this, the suggestion from this research is that it is hoped that law enforcers, namely the Police, Public Prosecutors. and judges in carrying out their duties in upholding justice must be careful and careful and also in terms of evidence to determine whether a defendant is really guilty and the Judge in giving a decision to the defendant must prioritize a sense of justice for the defendant and the victim so that the objectives of the law can be achieved.

Keywords: Criminal Responsibility, Perpetrator, Crime of Coercion with Violence or Threats